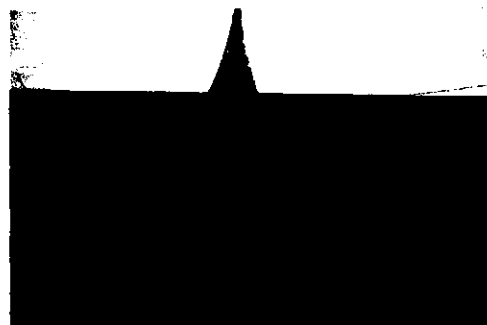


RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2019—2023



**Jl. KH Ahmad Dahlan No.5 Telp. (0752) 83146
Fax : (0752) 83146 Kota Padang Panjang 27128
Email : dinas.padangpanjang@gmail.com**

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika dan Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG	
2.1 Tujuan Fungsi dan struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan	15
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan	23
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah.....	24
3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian	
2.5 Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan.....	39
4.2 Sasaran	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	34
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN	
49	
BAB VIII PENUTUP.....	
50	

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2018.....	12
Tabel.2.2	Jumlah Tenaga Harian Lepas Tahun 2018.....	13
Tabel.2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Eselonering Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.....	13
Tabel.2.4	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan penjenjangan.....	14
Tabel 2.5	Data Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	14
Tabel 2.6	10 Penyakit Terbanyak Tahun 2018.....	15
Tabel T-C 23	Hasil Capaian Renstra Tahun 2013 – 2018.....	16
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2013 – 2018...	17
Tabel.2.7	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2018.....	18
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019.....	31
Tabel.3.2	Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Padang Panjang terhadap target nasional.....	35
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.....	42
Tabel T-C 26	Tujuan,Sasaran, strategis dan Kebijakan Perangkat	44
Tabel C-T 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan dokumen yang berisi arah dan rencana pembangunan serta target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini berdasarkan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan suatu OPD agar lebih terarah, efektif dan efisien serta selaras dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan hal di atas maka Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, sebagai bagian kewenangan daerah dibidang kesehatan yang diamanahkan oleh Kepala Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota untuk tahun 2019 – 2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Palaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Kesehatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1. Tersedianya dokumen sebagai acuan perencanaan dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
2. Tersedianya data pencapaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada 5 (lima) tahun kedepan.
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja, dan RKA Dinas Kesehatan
4. Salah satu instrument untuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan.

1.3.2. Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan kualitas pelayanan dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang dan mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**4.1. Tujuan****4.2. Sasaran****BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN****BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN****BAB VII. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Padang Panjang adalah Dinas yang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- C. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- D. Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan;
- E. Seksi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Pengobatan Tradisional;
 1. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- G. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT Promosi dan Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- 1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum,kepegawaian, keuangan,evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Tugas : menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian meliputi data pegawai, mutasi, disiplin, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Tugas : menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

(2) Fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit

(1) Tugas : Perumusan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, promosi dan sumber daya kesehatan

(2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, promosi dan sumber daya kesehatan
- b. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT, promosi dan sumber daya kesehatan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Kesehatan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

(1) Tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan,

termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

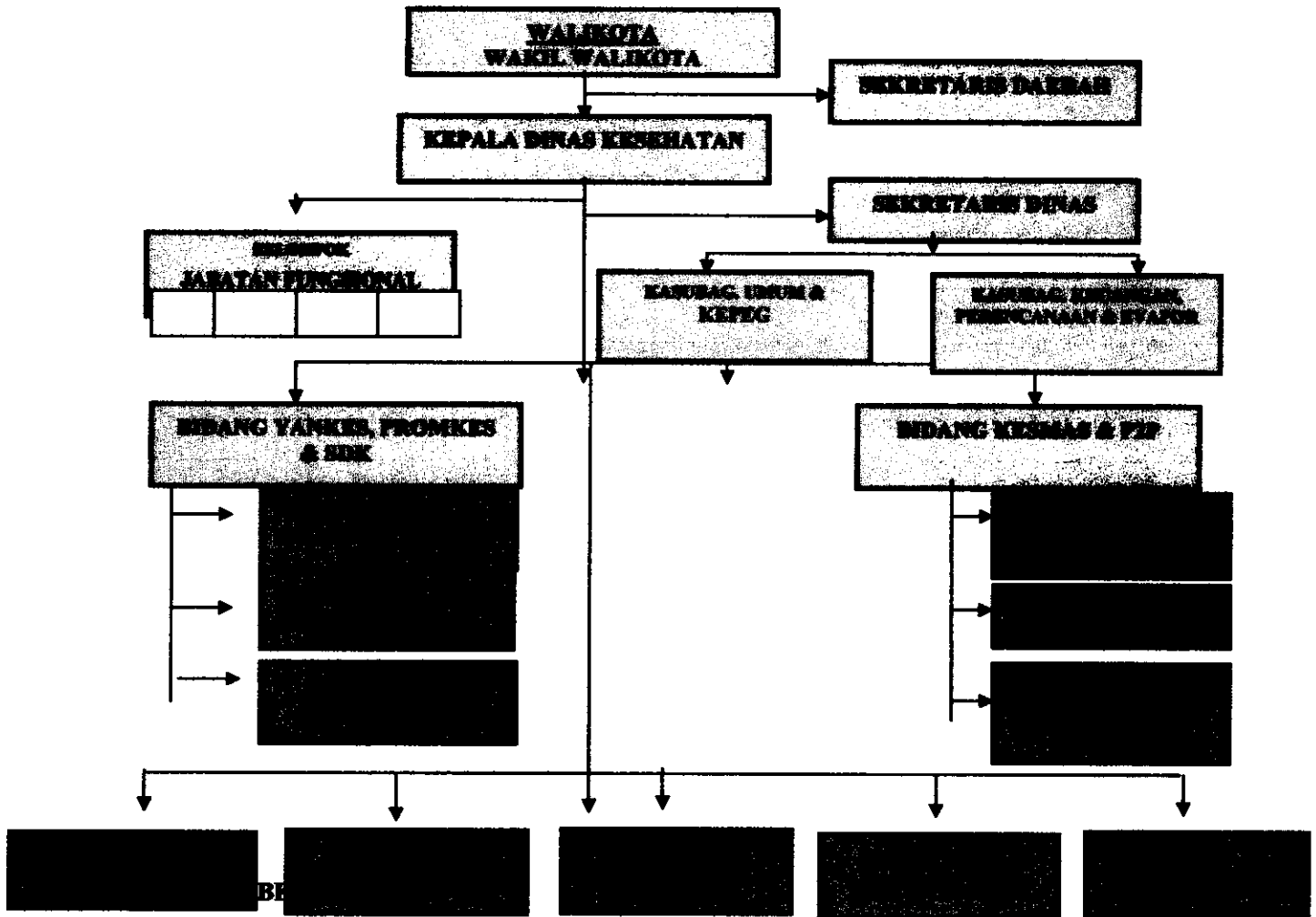
(2) Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DKK Padang Panjang



Jumlah Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2018

No	Jenis Tenaga	Jumlah	PR	LK
1	S 2 Kesehatan Masyarakat	6	5	1
2	S 2 Ekonomi Kesehatan	1	1	-
3	S2 Keperawatan/Spesialis	1	1	-
4	Dokter Umum	10	9	1
5	Dokter Gigi	4	4	-
6	Perawat Ners	4	4	-
7	Perawat S1	1	1	-
8	S1 Kesehatan Masyarakat	21	16	5
9	Apoteker	4	3	1
10	Bidan D IV Terapan	5	5	-
11	S1 Teknik Elektromedik	1	-	1
12	DIII Keperawatan	23	19	4
13	DIII Kesehatan Lingkungan	5	3	2
14	DIII Bidan	35	35	-
15	DIII Rekam Medik	8	7	1
16	DIII Gizi	4	4	-
17	DIII Analis Kesehatan	7	7	-
18	DIII Gigi	4	3	1
19	DIII Farmasi	5	5	-
20	S1 Akuntansi	1	1	-
21	DIII Elektromedik	1	1	-
22	DIII Kimia Analis	2	2	-
23	DI Bidan	5	5	-
24	Perawat (SPK)	14	14	-
25	SMAK	1	-	1
26	SPRG	4	3	1
27	SMF	8	5	3
28	SLTA	8	4	4
29	SD	1	-	1
	Jumlah	194	166	28

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2018

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Harian Lepas Tahun 2018

No	Jenis Tenaga	Jumlah	PR	LK
1	S 1 Keperawatan	1	1	-
2	DIII Keperawatan	1	1	-
3	DIII Bidan	4	4	-
4	DIII Komputer	1	1	-
5	SLTA	15	10	5
6	SLTP	4	3	1
7	SD	2	-	2
	Jumlah	29	20	8

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2018

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Eselonering Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

No	JABATAN	ESELON	JUMLAH	PENDIDIKAN	PR	LK
1	Kepala Dinas	II b	1	Strata 2	-	1
2	Sekretaris Dinas	III a	1	Strata 2	1	-
3	Kepala bidang	III b	2	Strata 2, Strata 1	2	-
6	Kasi /Kasubag	IV a	8	Strata 2-2, Strata 1-6	8	-
7	Kepala UPTD	IV a	5	Strata 1-5	2	3
8	Ka. TU UPTD	IV b	5	Strata 1-4, SLTA-1	5	-

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2018

Tabel 2.4
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan penjenjangan

No	Bakat	Jumlah
1	Diklatpim Tk. II	-
2	Diklatpim Tk. III	4
3	Diklatpim Tk. IV	7
	Jumlah	11

Sumber : Data Kepegawaian DKK Tahun 2018

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sampai Februari 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	2
2	Puskesmas	4
3	Puskesmas Pembantu	6
4	Balai Pengobatan	2
5	Puskesmas Keliling	4
6	Praktek Dokter	32
7	Praktek Bidan Mandiri	11
8	Pos Kesehatan Kelurahan	16
9	Posyandu Balita	92
10	Posyandu Lansia	36
11	Poskestren	16
12	Apotik	13
13	Toko obat	4

Sumber : Bid.Yankes, Promkes dan SDK 2018

2.3 KINERJA PELAYANAN

2.3.1. GAMBARAN 10 PENYAKIT TERBANYAK

Gambaran 10 penyakit terbanyak di Kota Padang Panjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2018

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	Common Cold	9082
2	Hipertensi	5082
3	Kelainan Refraksi	2830
4	Pharingitis akut	2615
5	Infeksi akut lain pada saluran nafas atas	2590
6	Gastritis	2289
7	Penyakit pulpa dan jaringan perapikal	2227
8	Diabetes Mellitus	2118
9	Rheumatic	1880
10	Penyakit kulit alergi (Dermatitis)	1849
		32.570

Sumber : Bidang Yankes, Promkes dan SDK 2018

2.3.2. HASIL YANG DICAPAI

Keberhasilan pencapaian program tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018

INDIKATOR SASARAN	TARGET NSPK	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase penduduk yang ber Prilaku Hidup Bersih Sehat	-	55%	60%	65%	70%	75%	31.90%	53.80%	61.30%	61.64%	41.85%	58.00%	89.67%	94.31%	88.08%	55.80%
Capaian jumlah tatanan Kota Sehat	-	6 tatanan	6 tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	8 Tatanan	100%	100%	100%	100%	100%
Status Gizi kurang	< 5%	5.80%	5.80%	5.00%	5.00%	5.00%	5.10%	5.60%	5.82%	5.76%	5.50%	87.93%	98.55%	85.91%	88.81%	90.91%
Presentase tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai penempatan standar	-	64.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	95.00%	65.90%	80.00%	80.00%	80.00%	101.56%	101.39%	114.29%	106.67%	100.00%
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	-	-	-	2 PKM	2 PKM	4 Pkm	-	-	2 PKM	2 PKM	4 Pkm	-	-	100%	100%	100%
Pembangunan Puskesmas representatif (sesuai standar)	-	-	-	50%	50%	100%	-	-	50%	50%	100%	-	-	100%	100%	100%

Padang Panjang, Januari 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Dra.H. Nuryanuar, Apt, MM, M.Kes
Nip. 1962013 1891 1 001

Berikut table 2.8 anggaran dan realisasi pendaan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.



NO	Uraian	Agustus 1997 (Miliar Rp)		September 1997 (Miliar Rp)		Oktober 1997 (Miliar Rp)		November 1997 (Miliar Rp)		Desember 1997 (Miliar Rp)		Total (Miliar Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	Pendapatan dari hasil penjualan aset tetap	28.200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.200,000
(2)	Pendapatan dari hasil penjualan aset lancar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)	Pendapatan dari hasil penjualan aset tidak lancar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	Pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)	Pendapatan dari hasil penjualan aset tetap lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)	Pendapatan dari hasil penjualan aset lancar lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7)	Pendapatan dari hasil penjualan aset tidak lancar lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8)	Pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	Pendapatan dari hasil penjualan aset tetap lainnya (lanjutan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)	Pendapatan dari hasil penjualan aset lancar lainnya (lanjutan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	Pendapatan dari hasil penjualan aset tidak lancar lainnya (lanjutan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12)	Pendapatan dari hasil penjualan aset lain-lain lainnya (lanjutan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)	TOTAL	28.200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.200,000

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN
KEFISCALAN

Dr. H. M. Nurjannah, Ph.D.
Kepala Biro Perencanaan
No. 1000/P/1997/1091

No	Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
15	Cakupan puskesmas pembantu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	%	85	85.9	93.00	92.15	92.53	92,15
17	Cakupan Ibu nifas	%	98.92	88.4	90.5	99.08	98.81	94,51
18	Cakupan Pelayanan Anak balita	%	70	79.7	83.2	81.78	69.15	81,8
19	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.0008	0.0005	0.001	0.0002	0.0002	0
21	Cakupan Penanganan penderita HIV/AIDS	Kasus	-	-	2 kasus	7 kasus	4 kasus	5 kasus
22	Cakupan penanganan penderita Hipertensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase rumah tangga ber PHBS	%	-	-	-	61.3%	56.36%	41.85%
24	Persentase rumah sehat	%	85.72	82.71	-	-	68,13%	74,55%
25	Persentase Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi	%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
26	Rasio Rumah Sakit Pemerintah dengan Akreditasi Nasional	%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
27	Ketercukupan ketersediaan obat dan vaksin	Bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase sekolah yg menyediakan PJAS (pangan jajanan sehat) melalui warung sekolah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Tahun 2018

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan

1. Tingginya harapan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna.

Hal ini merupakan tantangan terbesar bagi industri pelayanan kesehatan di seluruh dunia.

Mengingat tingkat pendidikan dan wawasan yang sudah semakin tinggi, status ekonomi

yang makin meningkat, diseminasi informasi dengan akses internet yang makin mudah dan dapat dijangkau siapa saja, baik melalui jejaring sosial maupun media lainnya.

2. Belum terintegrasinya Sistem informasi kesehatan secara baik dan data yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya
3. Kapasitas, komitmen dan profesionalisme sumber daya kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya
4. Perkembangan Teknologi Kesehatan

Teknologi industri yang semakin maju dan berkembang sangat mempengaruhi teknologi kesehatan. Peralatan medis semakin canggih dan berkembang membuat tenaga kesehatan harus selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan teknologi moderen di bidang kesehatan.

5. Pengaruh Global Warming terhadap anomali dan kecendrungan penyakit serta bencana.

Peningkatan suhu bumi akibat efek rumah kaca mengakibatkan meningkatnya berbagai jenis penyakit tertentu terutama penyakit zoonosis. Fenomena meningkatnya penyakit dengan berbagai anomali ini, membutuhkan keahlian khusus dari tenaga kesehatan untuk dapat mencegah dan mengatasinya. Serta trend bencana yang semakin terjadi.

6. Padang Panjang terletak didaerah persimpangan yang menghubungkan berbagai daerah.

Letak geografis Kota Padang Panjang yang dipersimpangan merupakan tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Karena akses yang dekat ke beberapa daerah yang bisa menjadi pesaing menjadikan segala sarana prasarana dan SDM yang ada untuk selalu meningkatkan diri untuk mampu bersaing dimata masyarakat dan di pilih sebagai tempat pelayanan kesehatan.

2.4.1. Peluang

1. Ketersediaan Anggaran dalam APBD/APBN sehingga dapat mengakomodir kebutuhan peningkatan ilmu dan keterampilan dari tenaga kesehatan.
Hal ini juga dimungkinkan dengan banyaknya lembaga/institusi pendidikan baik swasta maupun negeri yang dapat diakses dengan mudah.
2. Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang cukup mendukung dalam sistem penganggaran dalam bidang kesehatan.
Hal ini memungkinkan kemudahan dalam perencanaan penganggaran keuangan pelayanan kesehatan dan pencairan dana.
3. Tingginya Komitmen Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi Misi Daerah
Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan sistem pelayanan kesehatan di daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Mengingat segala perencanaan dan penganggaran biaya harus disetujui oleh kepala daerah. Selain itu visi misi pemerintahan daerah ini merupakan lanjutan dari visi misi kepala pemerintah sebelumnya yang juga memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan pelayanan kesehatan.

4. Dukungan dana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui APBN dan DAK dapat meningkatkan kemajuan pelayanan disamping sumber dana dari APBD yang ada di daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi masalah bersumber dari kajian dan evaluasi capaian kinerja indikator kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari hasil telaahan tersebut dapat dihasilkan daftar permasalahan secara faktual yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan secara umum pada periode mendatang. Berikut dibawah ini diuraikan permasalahan yang perlu diatasi pada masa mendatang ;

1. Masih relatif rendahnya capaian indeks masyarakat sehat dimana pada tahun 2018 angka persentase keluarga sehat dari hasil pendataan PIS-PK sebesar 24,58 % .
2. Masih rendahnya status gizi masyarakat dimana angka kasus "stunting" (balita pendek) pada tahun 2016 angka "stunting" sebesar 15,6 % dan tahun 2017 sebesar 19,6 % tahun 2017
3. Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang, dimana pada tahun 2016 tidak ditemukan ibu melahirkan yang mati, tahun 2017 meningkat menjadi 3 oran sedangkan di Tahun 2018 tida ada kematian ibu melahirkan .
4. Masih relatif tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Padang Panjang, dimana tahun 2016 ditemui bayi yang meninggal sebanyak 13 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 12 orang bayi dan cendrung meningkat lagi tahun 2018 sebanyak 13 orang.
5. Masih belum tercapainya cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100% terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Padang Panjang. Dimana capaian masyarakat yang sudah mendapatkan pembiayaan kesehatan tahun 2017 sebesar 95 % dan tahun 2018 sebanyak 94,89%
6. Belum optimalnya peningkatan upaya kesehatan masyarakat terutama kualitas pelayanan kesehatan dasar karena belum ada pelayanan akses langsung kepada masyarakat seperti program PSC 119 dan dokter warga.
7. Masih belum tercapainya target Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat, karena pencapaian indikator sehat pada tahun 2018 masih 41,85% jauh dibawah target yang sudah ditetapkan.
- 8.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Berdasarkan penyusunan Rencana Pemabangan jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 maka yang ditetapkan sebagai visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut ;

VISI :

Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat

Visi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 di atas merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang. Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah:

Untuk Kejayaan Padang Panjang	Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> .
Bermarwah	Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.
Bermartabat	BERMARTABAT diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang

Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri membawa komitmen dan konsisten kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”,

dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka misi terkait Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

MISI 2 : PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

“ Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya “

Pembangunan pilar kesehatan diprioritaskan pada beberapa kegiatan strategis antara lain Dokter Warga, merupakan pelayanan langsung dokter kepada masyarakat di tingkat kelurahan, program Waliy Siaga (siaga melindungi) melalui pelayanan kesehatan darurat (PSC 119), program pendampingan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta Padang Panjang bergoro.

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran :

1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Program Pemasyarakatan Olahraga
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Peningkatan Gizi masyarakat
8. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah

Dari dokumen RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 tersebut diatas terlihat bahwa Urusan Kesehatan terletak pada Misi 2. Sedangkan keterkaitan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan berada pada sasaran nomor 1, 5, 6 dan 7. Tujuan dan sasaran inilah yang dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2019-2023

3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang diambil dari RPJM Provinsi Sumatera Barat dinyatakan visi dan misi sebagai berikut ;

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

MISI 3 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi

Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan.
2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan”, maka ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran :
 1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 195 puskesmas pada tahun 2021
 2. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 7 rumah sakit pada tahun 2021
 2. Dalam mewujudkan tujuan kedua yaitu “Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit. “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran:
 1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun sebesar 25,6 % pada tahun 2021
 2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF) menjadi 90 % pada tahun 2021.
 3. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar menjadi 95 % pada tahun 2021.
 - b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator sasaran :
 1. Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2021.
 3. Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indicator sasaran :
 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi B pada tahun 2021
 4. Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional“, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran :
 1. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 beberapa strategi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
2. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3. Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu

Arah kebijakan yang dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif
2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
3. Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
4. Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
5. Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah
6. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
7. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
8. Peningkatan cakupan akses, keterjangkauandan mutu pelayanan kesehatan
9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis
11. Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
12. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
13. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi
14. Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan
15. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
16. Peningkatan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Table 3.1

Sasaran Pembangunan Kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	STATUS AWAL	TARGET 2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	360
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	< 0,50
	c. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
	d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
	f. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
	b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
	c. Persentase kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan		
	a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
	c. Persentase RSUD Kab/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
	d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90,0
	e. Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015 – 2019

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
5. Meningkatkan akses pelayanan rujukan yang berkualitas
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kesehatan diatas, terlihat bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan aplikasi dan pengembangan dari rencana strategi provinsi dan pusat agar terdapat sinkronisasi kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan secara terstruktur dari pusat ke kabupaten/kota. Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian lingkungan dan implikasinya terhadap rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Padang terdapat salah satu rencana kegiatan dalam bentuk pencapaian lingkungan sehat di Kota Padang Panjang. Dimana salah satu cakupan/ indikator yang akan di capai adalah ;

- Presentase penduduk yang memiliki jamban sehat
- Persentase penyakit menular yang dapat ditangani

Kegiatan diatas dapat terlaksana secara maksimal jika di dukung dengan pengaturan dan pengawasn tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan melalui kerjasama lintas sektor dari beberapa SKPD, seperti ; Dinas PU, Dinas Perindagkoptan, Lingkungan Hidup dan lainnya.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD.

Kota Padang Panjang melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 58 % (114 indikator) dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan Kota. Berikut komposisi secara keseluruhan terhadap capaian TPB di Kota Padang Panjang.

Tabel 3.2
CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA PADANG PANJANG
TERHADAP TARGET NASIONAL

TPB	Jumlah Indikator	Sudah Terlaksana & Tercapai (SS)	Sudah Terlaksana & Belum tercapai	Tidak Ada Data/Belum Tercapai
Tanpa Kemiskinan	25	15	9	1
Tanpa Kelaparan	11	6	2	3
Kehidupan sehat dan sejahtera	31	21	5	5
Pendidikan berkualitas	13	10	3	0
Kesetaraan gender	14	8	4	2
Air bersih dan sanitasi layak	10	1	6	3
Menjamin akses energi	2	0	0	2
Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	13	3	3
Infrastruktur, industri dan inovasi	10	7	0	3
Mengurangi kesenjangan	6	2	1	3
Kota dan pemukiman berkelanjutan	12	8	2	2
Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	3
Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0
konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	0	0	0	0
Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	3	0	1	2
Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	20	10	2	8
Kemitraan untuk mencapai tujuan	13	10	0	3

Dari tujuan yang ditetapkan dalam dokumen KLHS urusan kesehatan terdapat pada poin :

1. Poin ke - 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
2. Poin ke - 6 : Air bersih dan sanitasi layak

Untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut diatas telah dilakukan berbagai upaya agar sejalan dan mencapai tujuan pembangunan pemerintah daerah Kota Padang Panjang.

3.5. PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1. Analisis Isu Strategis

Telaahan Isu Strategis sangat penting dilakukan dalam penyusunan suatu rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan cukup strategis akan meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan khususnya di bidang kesehatan, sehingga dapat di operasionalkan dan di pertanggung jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan terhadap analisis lingkungan internal dan eksternal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Padang Panjang.

Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang dapat diidentifikasi dengan baik, maka Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Kesehatan dapat mempertahankan dan bahkan dapat berupaya meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan kesehatan serta menjadi acuan untuk merumuskan capaian kinerja pembangunan kesehatan 5 (lima) tahun kedepannya 2019-2023.


Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam menyusun isu strategis adalah;

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan
3. Luasnya dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap masyarakat
4. Memiliki daya ungkit bagi kemajuan pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk dilaksanakan

3.5.2. ISU STRATEGIS

Belum terwujudnya derajat kesehatan masyarakat secara optimal dan merata membutuhkan upaya untuk penngkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih mandiri, serta diikuti dengan peningkatan akses dan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan sehingga dapat lebih menjangkau setiap lapisan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kota Padang Panjang. Adapun isu strategis yang menjadi dasar dan target ke depan adalah ;

1. Masih rendahnya cakupan indeks masyarakat sehat di Kota Padang Panjang
 2. Masih tingginya angka "stunting" pada anak
 3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Padang Panjang
 4. Masih rendahnya cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 5. Belum optimalnya upaya peningkatan mutu sumber daya kesehatan dan sarana prasarana

 6. Belum optimalnya akses pelayanan langsung kepada masyarakat
 7. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang
 8. Belum optimalnya pemenuhan akses jamban sehat pada masyarakat
 9. Belum optimalnya pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas
 10. Belum terwujudnya capaian *Universal Health Coverage* (UHC) 100%
 11. Masih rendahnya capaian *Universal Child Immunization* (UCI)
 12. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular terutama HIV dan TB Paru
 13. Belum optimalnya pelayanan promotif dan preventif yang inovatif dan edukatif dalam upaya pencegahan penyakit
 14. Masih rendahnya cakupan kunjungan bayi balita ke Posyandu
- 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi Kepala Daerah. Dalam artian bahwa Tujuan merupakan apa yang akan di capai atau yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Dinas Kesehatan menetapkan tujuan pelayanan yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa pencapaian target dalam 5 (lima) tahun terakhir serta target yang ingin dicapai kedepannya. Hal ini juga berlandaskan trend dan arah pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan utama dari kegiatan urusan kesehatan adalah;

” Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ”

4.2. SASARAN

Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri dengan optimal adalah ;

Terwujudnya Masyarakat Sehat di Kota Padang Panjang

Untuk dapat mencapai sasaran ini ditetapkan indikator sasaran yang dapat diukur, yaitu

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS). Dimana data capaian tahun 2018 adalah sebesar 0,25% dan ditargetkan tahun 2023 akan mencapai realisasi 0,85%. Pencapaian program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, terutama kegiatan peningkatan akses pelayanan langsung (PSC 119), dokter warga, peningkatan akreditasi Puskesmas, kelengkapan penyediaan sarana prasarana, obat dan perbekalan kesehatan lainnya serta peningkatan mutu kualitas SDM kesehatan di seluruh Puskesmas. Adapun pengukuran dari keberhasilan kegiatan untuk perwujudan masyarakat sehat ini adalah melalui persentase keluarga sehat. Dimana data awal tahun 2018 adalah sebesar 24,58% dengan target capaian akhir tahun 2023 adalah 85%.
2. Disamping itu indikator sasaran lainnya yaitu persentase balita pendek "stunting". Dimana tahun 2017 persentase stunting pada anak balita adalah sebesar 19,7 % dan tahun 2018 sebesar 18 %. Untuk mengurangi kasus stunting ini diwujudkan melalui upaya pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita kurang gizi, pendampingan keluarga serta upaya preventif dan promotif lainnya. Indeks pengukuran keberhasilan peningkatan status gizi masyarakat dengan melalui pengukuran persentase balita gizi kurang. Dimana pada data awal tahun 2018 sebesar 5,5% dan target tahun 2023 adalah sebesar kurang dari 5 %.

3. Indikator sasaran berikutnya adalah Angka Kematian Ibu. Dimana tahun 2017 terdapat kematian ibu melahirkan sebanyak 3 orang. Sedangkan tahun 2018 tidak ada kematian ibu melahirkan. Kita berharap dan mengusahakan Angka Kematian Ibu tetap 0 atau tidak ada kematian ibu yang terjadi saat melahirkan sampai dengan tahun 2023.
4. Indikator sasaran ke empat adalah Angka Kematian Bayi. Tahun 2017 ditemukan kasus kematian bayi yang cukup tinggi, yaitu 12 orang bayi, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 13 orang. Untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi dalam 5 tahun kedepan, akan lebih ditingkatkan upaya deteksi dini dari ibu hamil dan control intensif pada bayi yang beresiko melalui kunjungan rumah, pemberian makanan tambahan, menyiapkan pendanaan yang cukup bagi ibu melahirkan melalui Jampersal dan pendampingan bagi keluarga ibu melahirkan yang dirawat baik dalam maupun luar kota. Disamping itu juga lebih mengintensifkan upaya promosi kesehatan pada masyarakat umum, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lintas sector lainnya,
5. Indikator berikutnya adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 100 % bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang. Dimana capaian tahun 2017 adalah 95% dan tahun 2018 sebesar 94,8%. Untuk dapat mencapai target UHC 100% telah disiapkan upaya melalui penyediaan dana pembayaran premi bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang yang tidak mampu membayar premi serta upaya promosi dan informasi kepada seluruh masyarakat.
6. Indikator lainnya dalam pencapaian cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Padang Panjang yang masih rendah dan jauh dari target 41,85%. Dari 10 indikator yang ada dalam PHBS masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya sangat rendah, sehingga menjadikan PHBS masih menjadi masalah untuk kedepannya,

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup			72,47	72,47	72,48	72,48	72,49
			Tercapainya Masyarakat Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,45	0,55	0,75	0,85
				Persentase Stunting	17,5%	17%	16,5%	16%	15,5%
				Angka Kematian Ibu (AKI)	0	0	0	0	0
				Angka Kematian Bayi (AKB)	12	11	10	9	8
				Persentase Universal Health Coverage (UHC)	96,25%	97,17%	98,09%	99,01%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menunjukkan bagaimana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu pada strategi RPJMD Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Misi 2 yaitu **Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.**

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat			
Misi 2 : Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas daya saing SDM yang Sehat, Berakhlak dan Unggul	Sasaran 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Mewujudkan Masyarakat Sehat	Sosialisasi penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAK) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Kadarzi DAK Jaminan Persalinan (Jampersal) Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelatihan dan evaluasi perawatan anak balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Pemetaan ibu hamil dan penjarangan ibu hamil Resiko tinggi Revitalisasi Gerakan sayang Ibu Revitalisasi sistem kesehatan Pelayanan Kesehatan dan Pendekatan Keluarga DAK Penurunan Stunting (Penugasan) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga

<p>Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Toga dan akkupresure</p> <p>Pengembangan kelurahan Siaga</p> <p>Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat</p> <p>Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan</p> <p>Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat</p> <p>Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat</p> <p>Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sekolah Sehat</p> <p>Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dan Sekolah Sehat</p> <p>Forum Kota Sehat (Pengembangan Tatanan Kota Sehat)</p> <p>Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</p> <p>Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>Sosialisasi dan Pemeriksaan Napza</p> <p>Pembinaan Usaha kesehatan Sekolah (UKS)</p> <p>Penyemprotan /Fogging sarang nyamuk</p> <p>Pembakaran sampah medis</p> <p>Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah</p> <p>Sosialisasi Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah</p> <p>Peningkatan Surveillance dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</p> <p>Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</p> <p>DAK bidang Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan)</p> <p>Peningkatan pelayanan Kesehatan darurat (P3K) dan Bencana serta Pembentukan Publi Service Center (PSC) 119</p> <p>Peningkatan pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu melalui Publik</p>		
--	--	--

			<p>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala alat kantorkantor</p> <p>Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan ke ndaraan dinas/operasional</p> <p>Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran</p> <p>Penyediaan Jasa Medis</p> <p>DAK Pelayanan Kesehatan Dasar</p> <p>Penunjang Operasional DAK</p>
--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas OPD Dinas Kesehatan berisi program- program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) dimasing – masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lainnya. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program seperti pada tabel 6.1.

(Tabel Indikator, sasaran dan pagu dana indikatif terlampir pada Tabel 6.1)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Indikator –indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	0,25	0,35	0,45	0,55	0,75	0,85	0,85
	Menurunnya Persentase Stunting	18%	17,5%	17%	16,5%	16%	15,5%	15,5%
	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	0	0	0	0	0	0	0
	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)	13	12	11	10	9	8	8
	Meningkatnya Persentase Universal Health Coverage (UHC)	94,89%	96,25%	97,17%	98,09%	99,01%	100%	100%
	Indikator Program A. Persentase Keluarga Sehat	25%	35%	45%	55%	75%	85%	85%
	B. Persentase Gizi Kurang	5.50%	5.00%	4.8%	4.50%	3.80%	2.60%	2.60%
	C. Persentase UCI	81,25%	84,25%	88,25%	92,25%	96,25%	100%	100%

D.Persentase Rumah tangga yg ber PHBS	41,80%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%
E.Tingkat Kepuasan Pelayan Kesehatan	79,38%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

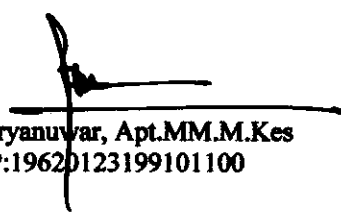
BAB VIII**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang dan disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan untuk periode 5 tahun mendatang (tahun 2019-2023).

Pelaksanaan Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kegiatan pada OPD yang dilaksanakan berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah di susun berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis ini juga digunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Organisasi perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Padang Panjang, Mei 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG



Drs. Nuryanuwar, Apt.MMM.Kes
NIP:19620123199101100

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Dasar Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renstranas												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1-02-17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	(3) persentase apotik, toko obat, toko kosmetik dan makanan yang dilakukannya pengawasan	(4) (%)	(6) 100	(8) 96.760.000	(7) 0	(9) 0	(10) 0	(11) 0	(12) 0	(13) 0	(14) 0	(15) 0	(16) 0	(17) 96.760.000	
1-02-17-01	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	(3) jumlah karantin seotak, sarana yang terawasi	(4) (Unit)	110	42.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.550.000
1-02-17-02	Sosialisasi dan Pemantauan NAPZA	(3) jumlah SLTP dan SLTA yang mengikuti sosialisasi NAPZA	(4) (Orang)	70	28.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.730.000
1-02-17-03	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Obat Kosmetik dan Obat Tradisional	(3) jumlah toko obat, toko kosmetik yang terawasi	(4) (Unit)	1000	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000
1-02-18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	(3) jumlah rumah Tanggys yang Ber PHBS	(4) (%)	80	271.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.125.000
1-02-19-04	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar, Hidup Sehat	(3) jumlah media informasi yang terwujud	(4) (Jenis)	8	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000
1-02-19-05	Asuhan Mandiri Melalui Pemantauan Toga dan Aluprasare	(3) jumlah kelurahan yang dimonev unit uk forum kelurahan seja aktif	(4) (Kelurahan)	16	31.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.150.000
1-02-19-06	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	(3) jumlah kader yang telah melaksanakan Gernas	(4) (Kelurahan)	16	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000
1-02-19-07	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	(3) jumlah kader dan nakes terlatih	(4) (Orang)	49.975.000	49.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.975.000
1-02-19-08	Monitoring dan Evaluasi Desa Siga	(3) jumlah kelurahan yang dimonev unit uk forum kelurahan seja aktif	(4) (Kelurahan)	16	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
1-02-20	Program Pembinaan Gizi Masyarakat	(3) persentase Balita Gizi Kurang	(4) (%)	5,60	198.074.000	5,00	322.161.236	4,60	345.122.375	4,36	387.887.113	3,00	428.883.824	3,00	1.684.878.462	
1-02-20-07	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	(3) jumlah balita gizi kurang	(4) (Orang)	7	51.250.000	5	58.375.000	5	62.012.500	5	66.213.750	5	75.035.125	5	312.886.375	
1-02-20-09	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sedar Gizi	(3) jumlah peserta kegiatan orientasi pendampingan sasaran keluarga rawan gizi	(4) (Kelurahan)	50	12.000.000	0	45.000.000	0	50.400.000	0	55.440.000	0	60.884.000	0	223.924.000	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rencana (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Rencana
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1-02-45-01	Penyempurnaan (flogging Sarung Nyamuk	(3)	(4)	50	15.000.000	50	31.900.000	50	31.900.000	50	31.900.000	50	31.900.000	250	142.600.000	
1-02-45-02	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	(Orang)	(Orang)	100	28.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	28.940.000	
1-02-45-03	Pelayanan Pengobatan dan Penanggulangan Penyakit Menular	(Orang)	(Orang)	568	80.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	568	80.285.000	
1-02-45-04	DAK bidang Pengendalian Penyakit (DAK Penguat)	(Tahun)	(Tahun)	1	178.298.000	0	197.227.800	0	207.098.190	0	217.443.650	0	228.315.832	1	1.028.374.472	
1-02-45-05	Sosialisasi Imunisasi Balita, Anak Sekolah, Penyakit Tikak Menular dan Penyakit Menular	(Buah)	(Orang)	0	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	8200		
1-02-45-07	Penjagaan Penyakit Tidak Menular dan Surveillance	(Buah)	(Buah)	0	202.950.000	27	208.023.550	27	213.400.000	27	218.554.952	27	218.554.952	27	842.828.502	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rencana (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Rencana
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(3)	(%)	90	2.448.568.488	91	2.328.975.339	92	2.570.848.019	93	2.870.848.019	94	2.870.848.019	94	12.485.482.484	
0-00-01-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Tahun)	(Tahun)	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.500.000	
0-00-01-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Bulan)	(Bulan)	12	181.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	181.800.000	
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	(Unit)	(Unit)	71	767.346.488	71	708.611.838	71	827.205.904	71	827.205.904	71	827.205.904	71	3.877.578.038	
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(Orang)	(Orang)	18	532.854.000	18	546.216.350	16	559.871.759	16	559.871.759	16	559.871.759	16	2.758.725.927	
0-00-01-05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(Jenis)	(Jenis)	50	82.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	
0-00-01-06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Unit)	(Unit)	6	95.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	95.700.000	
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	(Tahun)	(Tahun)	1	70.440.000	1	83.388.000	1	74.008.025	1	74.008.025	1	74.008.025	1	355.854.075	
0-00-01-08	Repat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	(Tahun)	(Tahun)	1	388.380.000	1	347.742.000	1	405.940.488	1	405.940.488	1	405.940.488	5	1.951.943.464	
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	(Orang)	(Orang)	11	185.558.000	11	190.196.950	11	194.951.874	11	194.951.874	11	194.951.874	55	860.810.872	
0-00-01-10	Penyediaan Jasa Medis	(Tahun)	(Tahun)	1	95.000.000	1	95.325.000	1	97.708.125	1	97.708.125	1	97.708.125	5	481.448.375	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rencana (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program/Proyek/Program/Proyek												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Rencana		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1-02-16-10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Surungan	Jumlah pembelian obat-obatan dan BHP	(%)	40		0		0		0		0		0	636.000.000	0	0	636.000.000
1-02-16-11	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Flask)	Jumlah pembelian obat-obatan dan BHP	(%)	40		0		0		0		0		0	2.855.301.000	0	0	2.855.301.000
1-02-16-13	Pelayanan PKK	Jumlah pengunjung dan pemanfaatan kesehatan kepada masyarakat	(%)	100		100		100		100		100		100	3.147.989.303	100	100	3.470.630.211
1-02-16-14	Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Kelangkaan	Jumlah peserta pelatihan capacity building	(Orang)	25				0		0		0		0	110.775.000	0	25	110.775.000
1-02-16-17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah keluarga yang di Data di 16 Kelurahan	(Keluarga)	5				0		0		0		0	84.390.000	0	160 KK	84.390.000
1-02-16-19	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Dokter Warga	Jumlah Peserta kegiatan orientasi PKPR bagi petugas kesehatan, siswa sekolah dan lintas sektor	(Orang)	58		0		0		0		0		0	28.000.000	0	58	28.000.000
1-02-16-20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Danzlat (PKK) dan Bancana Serta Pembantuan Public Service Centre (PSC) 119	Persentase masyarakat yang berlayani oleh dokter warga dan persentase pengabdian yang terbangun	(%)	100%				0		0		0		0	420.482.000	0	100%	420.482.000
1-02-16-28	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar Hidup Sehat	Pelayanan Langsung PSC 119	(%)	100		0		0		0		0		0	1.085.353.600	0	100	1.085.353.600
1-02-16-35	Sosialisasi dan Pementakan NAPZA	Pelatihan PRGD pada petugas kesehatan	(Orang)	50		0		0		0		0		0	20.000.000	0	50	20.000.000
1-02-16-37	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar Hidup Sehat	Jumlah Media informasi yang tersedia	(Jenis)	0		11		70.000.000		11		76.000.000		11	76.000.000	44	220	288.000.000
1-02-16-40	Pengembangan Pelayanan Haji	Jumlah Calon Jemaah Haji dan tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan kesehatan haji	(Orang)	220		0		0		0		0		0	20.000.000	0	220	20.000.000
1-02-16-41	Sosialisasi dan Pementakan NAPZA	Jumlah siswa SLTP dan SLTA yang mengikuti sosialisasi NAPZA	(Orang)	0		70		44.500.000		70		44.500.000		70	44.500.000	260	4000	178.000.000
1-02-16-42	Penyuluhan Masyarakat Pois Hidup Sehat	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah penyuluhan melalui media elektronik	(Orang)	0		50		75.000.000		50		99.000.000		50	99.000.000	200	374.000.000	
1-02-16-43	Pengembangan Kelurahan Siaga	Jumlah Kelurahan yang di Movev untuk Forum Kelurahan Siaga aktif	(Kelurahan)	0		16		158.800.000		16		80.000.000		16	80.000.000	16	398.800.000	
1-02-16-44	Pemetaan Ibu Hamil dan Pengetahuan Ibu Hamil Realito Tinggi	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan dan skrining ibu hamil dan resiko tinggi	(Kelurahan)	0		16		26.850.000		16		26.850.000		16	26.850.000	16	107.800.000	
1-02-16-45	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Peserta Sosialisasi dan capacity building Nikes	(Orang)	0		60		22.000.000		60		22.000.000		60	22.000.000	250	88.000.000	
1-02-16-46	Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	Persentase jasa media pelayanan yang di bayarkan	(%)	0		30		2.342.928.500		60		2.342.928.500		60	2.342.928.500	60	9.371.714.000	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Output/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Rencana (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pemasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Rencana	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1-02-44-06	(2) Peningkatan Maju SDM Kesehatan dan Uji Kompetensi Nakes	(3) Jumlah peserta workshop dan sosialisasi	(4) (Orang)	(5) 0	(6) 100.000.000	(7) 80	(8) 100.000.000	(9) 80	(10) 100.000.000	(11) 320	(12) 400.000.000
1-02-44-07	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Poyandu yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	35 (Buat)	0	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	1.550.500.000
1-02-44-08	Penyisipan Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mempunyai Mula Pelayanan dan Kinerja melalui Akreditasi	(P-uskesmas)	0	239.570.888	4	246.566.965	4	251.560.964	4	984.821.024
1-02-44-09	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Calon Jemaah Haji dan tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan kesehatan haji	(Orang)	0	22.000.000	220	22.000.000	220	22.000.000	1100	88.000.000
1-02-44-10	Pelayanan P3K	Jumlah peserta pelatihan capacity building	(Orang)	25	113.544.375	25	116.382.964	25	119.292.559	125	471.494.791
1-02-44-11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah masyarakat yang menerima Jaminan Pelayanan Kesehatan, Pemasangan Keluarga Pauslen Kurang Mampu yang difasilitasi	(Kegiatan)	6	6.989.389.010	100	7.249.508.235	100	7.450.743.891	100	26.286.151.824
1-02-44-12	Pelayanan Kesehatan dan Pendekatan Keluarga (PIS PK)	Jumlah keluarga yang di Dats di 16 Kelurahan	(Kelurahan)	16	70.829.000	16	77.911.900	16	85.703.000	16	328.717.399
1-02-44-13	Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Dokter Warga	Perentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan persentase pengaduan yang tertangani	(%)	0	447.004.300	100	441.779.408	100	452.823.893	100	1.808.782.091
1-02-44-14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Derajat dan Berkas, Serta Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan petugas PSC 119	(Orang)	0	1.013.390.140	30	1.028.403.964	41	1.043.317.733	147	4.143.184.804
1-02-44-15	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Perentase pengaduan yang tertangani	(%)	25				86		100	
1-02-44-16	DAK Pelayanan Dasar	Jumlah alat kesehatan yang disanakan di 4 Puskesmas	(Orang)	0	22.000.000	40	22.000.000	40	22.000.000	160	88.550.000
1-02-44-17	Penunjang DAK Pelayanan Dasar	Jumlah kegiatan DAK yang terlaksana	(Pusatmas)	0	590.497.000	4	590.497.000	4	590.497.000	4	2.321.988.000
1-02-44-18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Puskesmas/ Jaringannya	Jumlah sarana Puskesmas yang dipelihara	(Tahun)	0	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000
1-02-44-19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang didakan	(Tahun)	0	139.246.250	1	139.246.250	1	139.246.250	1	556.985.000
1-02-44-20	Pemeliharaan/berbentuk sarana dan prasarana Puskesmas	Jumlah sarana Puskesmas yang dipelihara	(Tahun)	0	124.793.750	1	124.793.750	1	124.793.750	1	499.176.000
1-02-44-21	DAK Jemporal	Jumlah pelayanan kesehatan pada ibu melahirkan	(Tahun)	1	374.850.000	1	393.692.600	1	413.272.126	1	1.615.660.356
1-02-45	Program Pengalangan dan Penanggulangan Penyakit	Perentase UCI	81,36 (%)	90,00	303.623.000	92,35	379.345.849	94,35	466.870.200	100	2.625.131.588

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuantampak/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-1	Tahun-5	Rp.	Rp.
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1-02-45-01	Penyempurnaan Fogging Spraying Nyamuk	(5)	(4)	50	15.000.000	50	31.900.000	50	31.900.000	50	31.900.000	50	31.900.000	50	31.900.000	250	142.800.000
1-02-45-02	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	(Orang)	(Orang)	100	28.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	28.940.000
1-02-45-03	Pelayanan Pergerakan dan Penanggulangan Penyakit Menular	(Orang)	(Orang)	568	80.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568	80.285.000
1-02-45-04	DAK bidang Perpendidikan Penyakit (DAK Perawatan)	(Tahun)	(Tahun)	1	179.290.000	0	197.227.800	0	207.089.190	0	217.443.690	0	228.315.832	0	228.315.832	1	1.029.374.472
1-02-45-06	Sosialisasi Imunisasi Balita, Anak Sekolah, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular	(Buah)	(Orang)	0	0	1900	120.149.500	668	123.332.900	668	128.834.940	668	130.699.854	2672	501.003.594		
1-02-45-07	Peningkatan Penyakit Tidak Menular dan Surveillance	(Buah)	(Buah)	0	0	27	202.950.000	27	209.023.550	27	213.400.000	27	218.554.952	27	842.928.502		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuantampak/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-1	Tahun-5	Rp.	Rp.
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(3)	(4)	90	2.448.968.498	91	2.326.975.839	92	2.870.646.019	93	2.870.646.019	94	2.870.646.019	94	12.489.482.466		
0-00-01-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Tahun)	(Tahun)	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000		
0-00-01-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Bulan)	(Bulan)	12	181.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.800.000		
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	(Unit)	(Unit)	71	787.346.488	71	708.611.839	71	827.205.904	71	827.205.904	71	827.205.904	71	3.977.576.039		
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(Orang)	(Orang)	16	532.684.000	16	548.216.350	16	559.871.759	16	559.871.759	16	569.871.759	16	2.758.725.627		
0-00-01-05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(Jenis)	(Jenis)	50	82.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000		
0-00-01-06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Unit)	(Unit)	6	95.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.700.000		
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	(Tahun)	(Tahun)	1	70.440.000	1	63.398.000	1	74.008.025	1	74.008.025	1	74.008.025	1	305.854.075		
0-00-01-08	Repat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	(Tahun)	(Tahun)	1	386.380.000	1	347.742.000	1	405.940.488	1	405.940.488	1	405.940.488	5	1.861.943.464		
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	(Orang)	(Orang)	11	185.558.000	11	190.195.950	11	194.961.874	11	194.961.874	11	194.961.874	55	960.810.572		
0-00-01-10	Penyediaan Jasa Medis	(Tahun)	(Tahun)	1	95.000.000	1	95.325.000	1	97.708.125	1	97.708.125	1	97.708.125	5	481.449.375		

